



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. pendapatan asli daerah

- a) pajak daerah : Rp70.549.469.190,40
- b) retribusi daerah : Rp8.815.836.861,55
- c) hasil pengelolaan : Rp11.554.401.865,75
kekayaan daerah yang
dipisahkan

d) lain-lain PAD yang sah : Rp75.278.078.027,16

jumlah pendapatan asli daerah : Rp166.197.785.944,86

2. pendapatan transfer

a) pendapatan transfer : Rp1.067.046.912.767,00
pemerintah pusat

b) pendapatan transfer : Rp75.833.020.604,29
antar daerah

jumlah pendapatan transfer : Rp1.142.879.933.371,29

3. lain-lain pendapatan

daerah yang sah

a) pendapatan hibah : Rp1.413.000.000,00

b) lain-lain pendapatan : Rp32.953.542.360,00
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

jumlah lain-lain pendapatan : Rp34.366.542.360,00
daerah yang sah
jumlah pendapatan : Rp1.343.444.261.676,15

b. Belanja

1. belanja operasi

a) belanja pegawai : Rp452.944.617.736,00
b) belanja barang dan jasa : Rp346.552.345.952,12
c) belanja hibah : Rp49.329.845.366,82
d) belanja bantuan sosial : Rp270.000.000,00
jumlah belanja operasi : Rp849.096.809.054,94

2. belanja modal

a) belanja modal peralatan dan mesin : Rp47.328.334.660,91
b) belanja modal gedung dan bangunan : Rp80.124.686.486,00
c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi : Rp61.756.523.779,50
d) belanja modal aset tetap lainnya : Rp895.926.450,00

jumlah belanja modal : Rp190.105.471.376,41

3. belanja tidak terduga : Rp8.385.156.879,00

4. belanja transfer

a) belanja bagi hasil : Rp4.396.335.000,00
b) belanja bantuan keuangan : Rp161.731.152.000,00

jumlah belanja transfer : Rp166.127.487.000,00

jumlah belanja : Rp1.213.714.924.310,35

surplus / (defisit) : Rp129.729.337.365,80

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan pembiayaan : Rp46.057.760.695,26

2. pengeluaran pembiayaan : Rp1.500.000.000,00

jumlah pembiayaan netto : Rp44.557.760.695,26

sisanya lebih pembiayaan : Rp174.287.098.061,06

anggaran (SILPA)

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran dan Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan dokumen pendukung/informasi lainnya dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 58